

## BAB IV

# PRIORITAS DAN SASARAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam hal penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah perlu adanya keselarasan baik antara dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini mulai dari dokumen Jangka Panjang (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD). Oleh karenanya dalam penyusunan RKPD selalu mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah daerah.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD tahun 2022 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dalam rangka mewujudkan Visi **“Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan”**. Untuk Pembangunan tahun 2023 ini difokuskan pada upaya Memperkuat agenda Papua berkeadilan dengan menurunnya kesenjangan antar daerah dan antar individu, meningkatnya ketahanan masyarakat, jaminan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan asset alam Papua, sebagaimana fokus pembangunan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 di bawah ini.

Gambar 4.1

Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023





Rumusan terhadap tema pembangunan RKPD tahun 2023 adalah **"Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan"**. Dengan unsur utama dalam tema tersebut adalah : (1) Peningkatan akses kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; (2) Penguatan stabilitas keamanan dan demokrasi; (3) Mengoptimalkan nilai tambah komoditas luar sector tambang; (4) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Kapasitas OAP dalam memanfaatkan peluang ekonomi (5) Pemantapan infrastruktur dasar dan konektivitas teknologi dan informatika antar wilayah dan (6). Meminimalkan tingkat kerentanan bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Selain fokus pembangunan yang menjadi arah kebijakan pembangunan di tahun 2023, penyusunan tema pembangunan pada tahun ini juga merujuk kepada isu-isu strategis nasional, isu strategis RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 dan isu strategis RKPD Provinsi Papua Tahun 2023, yang dapat dijabarkan kesandingannya sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Sandingan Isu-Isu Strategis Nasional, RPJMD Provinsi Papua**  
**Tahun 2019-2023 dan RKPD 2023**

No	Isu Strategis Kewilayahan Dalam Rancangan RPJMN 2022-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Papua 2019-2023	Isu Strategis RKPD Provinsi Papua 2023
1.	Pemenuhan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah	1. Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan 2. Peningkatan prestasi & pemanfaatan sarpras olahraga 3. Perlindungan social 4. Peningkatan Internasilsasi adat dan budaya 5. Pengarusutamaan gender & perlindungan anak
		3. Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi Papua
		4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik	1. Perbaikan tata kelola penyelenggaraan Otsus 2. Peningkatan pelayanan public 3. Peningkatan akuntabilitas dan transparasi penyelenggaraan pemerintah
2.	Peningkatan Daya Saing Daerah	5. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan	1. Pengembangan komoditas unggulanberbasis wilayah



No	Isu Strategis Kewilayahan Dalam Rancangan RPJMN 2022-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Papua 2019-2023	Isu Strategis RKPD Provinsi Papua 2023
3.	Penguatan pusat pertumbuhan wilayah	berbasis Komoditas	adat 2. Implementasi pembangunan berkelanjutan (green growth dan rendah karbon) 3. Peningkatan pemenuhan pangan berkelanjutan
4. 5.	Penurunan ketimpangan antar wilayah Pemanfaatan Ruang dan Urbanisasi	5. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan	1. Percepatan konektivitas transportasi antar moda 2. Penyediaan infrastruktur dasar secara merata di seluruh wilayah (air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi) 3. Percepatan pembangunan infrastruktur kampung, perbatasan dan wilayah terpencil) 4. Ketangguhan dalam adaptasi dan mitigasi bencana

## 4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan berbagai rumusan kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun Provinsi, yakni:

1. Isu-isu strategis nasional dan daerah yang menjadi permasalahan pembangunan, serta akar permasalahan dari pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah;
2. Komitmen-komitmen nasional, seperti program pembangunan yang berkeadilan (penanggulangan kemiskinan dan Sustainable Development Goals/SDG's) sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004;
3. Tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2023;
4. Sasaran pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023;
5. Arah pembangunan tahap ke-III RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005- 2025;
6. Pokok-pokok pikiran DPRP Provinsi Papua terhadap penyusunan RKPD 2023;
7. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2022, dan target Tahun 2023 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang



dihadapi oleh pemerintah provinsi yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2023.

Dari parameter-parameter tersebut diatas maka Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Provinsi Papua yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
2. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Percepatan Pembangunan dan Sarana Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

**Tabel 4.2**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Tahun 2023**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Target 2023	SKPD
<b>Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM</b>	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,21	Dinas Pendidikan, Perpustakaan & Arsip Daerah
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12	
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	persen	80	
	Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang/ tahun	300	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	persen	69,59	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 penduduk	4	
		Angka Kematian Ibu (AKI)	per 1000 kelahiran hidup	183,3	
		Prevelensi Stunting	persen	25	
		Angka Kesakitan	Persen	3	
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	75	Dinas Olahraga & Pemuda
		Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan	Persen	22,8	
	Terwujudnya internalisasi nilai	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	Jumlah	1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Target 2023	SKPD
	adat dan budaya asli tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat				
		cakupan cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	1	
		Cakupan kurikulum muatan lokal	dokumen	5	
	Meningkatnya efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	73	Badan Pembangunan kampung & OAP
	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	Rata-rata lama sekolah wilayah perbatasan	Tahun	12	Badan Perbatasan & Kerjasama
		Angka harapan hidup wilayah perbatasan	Tahun	68 Tahun	
		Pengeluaran perkapita wilayah perbatasan	Rp.juta perkapita	13,12	
	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun	50	Dinas Sosial, Kependudukan, PPPA
		Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang pertahun	50	
	Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	200	
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	80	
<b>Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan</b>	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	90	Dinas Pertanian & Pangan
		Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	5	
		Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	5	
		Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	5	
Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan		Cakupan daerah rawan pangan	Jmlh kab/kota		
		Persentase kenaikan cadangan pangan	Persen	30	
		Persentase penduduk tahan pangan	Persen	60	
	Megoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. Juta	25	Dinas ESDM
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	95	



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Target 2023	SKPD
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Air	Indeks	80	Dinas Kehutanan & LH
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	85	
		Intensitas Emisi	Ton co2/juta rupiah	0,343	
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	Rasio	30	
		Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	Persen	3	
		Laju Deforestasi	ribu hektar	25	
	Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor- sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10	Dinas Perindagkop & UMKM
		Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	4	
		Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	Jumlah	4	
		Persentase koperasi aktif dan berkembang	Persen	60	
		Jumlah UMKM yang berkembang	Jumlah	4000	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	ribu orang	1500	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
		Lama Tinggal Wisatawan	Hari	3,5	
	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	12	Dinas Perikanan & Kelautan
		NTP perikanan tangkap	Skor	105	
		NTP perikanan budidaya	Skor	100	
		Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/bulan	2,46	
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	80	Dinas Peridag, Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja
		Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	98,34	
	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor sektor andalan daerah	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Juta	64.926.000	Dinas PMPTSP
		Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Juta	95.427.000	
		Lama hari pengurusan ijin investasi	Hari	20	
<b>Percepatan Pembangunan</b>	Peningkatan akses transportasi	Persentase aksesibilitas antar wilayah	Persen	93,1	Dinas Perhubungan



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Target 2023	SKPD
<b>Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah</b>	berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan			
		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	55	
		Persentase jembatan provinsi dengan beton dalam kondisi baik	Persen	45	
	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	50	Dinas PUPRPKP
		Persentase pemanfaatan sumber daya air	Persen	80	
	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah (meningkatnya pendayagunaan air untuk berbagai kebutuhan)	Presentasi pengendalian daya rusak air / Presentase bangunan SDA yang fungsional	Persen	80	
	Meningkatnya layanan irigasi	Jumlah DAS yang direvitalisasi	DAS	17	
		Persentase luas cakupan layanan jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	Persen	50/65	
	Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir	Presentasi pengendalian daya rusak air	persen	80	
	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	Persen	40	
		Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Persen	45	Dinas PUPRPKP
		Backlog perumahan layak huni	Ribu juta	100	
	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	Unit	45	Dinas ESDM
	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	60	Diskominfo
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	10	
<b>Peningkatan Keamanan dan Ketertiban</b>	Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	Rasio kriminalitas yang ditangani	Persen	70	Badan Kesbangpol, Satpol PP & penanggulangan Bencana
	Meningkatnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	78,68	



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Target 2023	SKPD
	Meningkatnya Penegakan HAM	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM( Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3	
		Rata-rata nilai skor peduli HAM	Nilai	75	
		Nilai Skor aspek kebebasan sipil	Skor	95	
	Meningkatnya kebebasan sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	Nilai Skor aspek Hak-hak politik	Skor	50	
		Nilai Skor aspek lembaga demokrasi	Skor	60	
	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	kategori	Rendah	
<b>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan</b>	Peningkatkan kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	Tingkat capaian realisasi program- program Otsus yang direncanakan	Persen	100	Inspektorat; Biro Hukum; Biro Layanan PengadaanBarang & Jasa;
		Cakupan kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	jumlah Kabupaten/ Kota	7	Sekretariat
		Presentase OPD dengan nilai SAKIP B	Predikat	BB	Inspektorat; Biro Organisasi;
		Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	6,2	
		Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	persen	85	
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Implementasi e-government terintegrasi ( masukan E-planing dll ke program)	persen	95	
		Cakupan Inovasi Pelayanan Publik yang Masuk dalam List Outstanding (terpuji)	persen	1	
		Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Persen	100	Bapenda
	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Persen	85	
		Rasio belanja langsung	Persen	50	





Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Target 2023	SKPD
	program, serta kegiatan pembangunan daerah	dalam kondisi APBD			
		Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persen	70	
		Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	Inspektorat; BPKAD
	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	Kategori	Tepat waktu	
		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	14	

Target-target indikator sasaran pembangunan pada RKPD Perubahan Provinsi Papua Tahun 2023, seharusnya mengalami perubahan karena sasaran pembangunan di tahun 2023 ini adalah pada wilayah Provinsi Papua setelah pemekaran yang terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten/kota, namun karena belum ada data BPS yang dikerluarkan untuk Provinsi Papua pasca pemekaran, sehingga target indikator pembangunan masih menggunakan target indikator pembangunan Provinsi Papua sebelum pemekaran.



## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Indikasi rencana program Tahun 2023 berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Papua pada Tahun 2023, yang mempertimbangkan Prioritas Nasional, didalam bab ini, akan dikemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kondisi ditahun berjalan dan rencana kinerja yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023.

Adapun perubahan anggaran rencana kerja perangkat daerah dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD pada**  
**RKPD Perubahan Tahun 2023**

NO.	SKPD	Jumlah Anggaran (Rp)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		RKPD 2023 (Pagu indikatif)	APBD 2023	RKPD-P 2023 (Pagu indikatif)	Pagu Indikatif (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Perpustakaan Dan Arsip Daerah	244.396.719.974	164,312,070,157	165,312,070,157	190,068,746,615
2	Dinas Kesehatan	194.343.059.890	85.280.593.464	91.280.593.464	194.093.059.350
3	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	208,739,526,329	208,739,526,329	209,739,526,329	300,856,873,942
4	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (Blud)	78.000.000.000	78.000.000.000	78.000.000.000	-
5	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	80.917.799.540	80.917.799.540	81.917.799.540	192,212,606,488
6	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura (Blud)	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	-
7	Rumah Sakit Jiwa	24,972,109,119	24,972,109,119	29,972,109,119	82,963,647,663
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	8.619.902.599.619	677.982.979.560	677.982.979.560	8.491.502.599.619
9	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Bencana Daerah	50.603.117.530	22.504.298.150	23.885.811.118	50.603.117.530
10	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	70.832.630.074	29.796.738.700	30.796.738.700	71.775.650.074
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan	8.730.879.935	3.436.626.892	3.436.626.892	8.730.879.935



NO.	SKPD	Jumlah Anggaran (Rp)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		RKPD 2023 (Pagu indikatif)	APBD 2023	RKPD-P 2023 (Pagu indikatif)	Pagu Indikatif (Rp)
	Tenaga Kerja				
12	Dinas Pertanian Dan Pangan	110.037.071.916	39.558.415.920	39.919.815.920	110.037.071.916
13	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	196.544.593.545	60.722.027.170	67.861.767.170	153.486.906.368
14	Cabang Dinas Kehutanan Jayapura	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
15	Cabang Dinas Kehutanan Sarmi	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
16	Cabang Dinas Kehutanan Keerom	848.514.925	848.514.925	848.514.925	848.514.925
17	Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
18	KPHP UNIT XVII Waropen	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
19	KPHP UNIT XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
20	KPHP UNIT XXIII Sarmi	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
21	KPHP UNIT XIX Kepulauan Yapen	799.995.000	799.995.000	799.995.000	799.995.000
22	KPHL UNIT XX Biak	899.999.989	899.999.989	899.999.989	899.999.989
23	KPHP UNIT XXVIII Kota Jayapura	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
24	KPHP UNIT XXIX Keerom	1.099.999.793	1.099.999.793	1.099.999.793	1.099.999.793
25	UPTD Kebun Raya Koya Koso	850.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000
26	BPTH Papua	850.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000
27	UPTD Taman Burung Dan Taman Anggrek	850.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000
28	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua	241.718.350	241.718.350	241.718.350	241.718.350
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli Papua	74.796.267.938	29.505.402.600	30.505.402.600	74.796.267.938
30	Dinas Perhubungan	170.232.692.071	37.894.097.010	38.894.097.010	162.728.706.071
31	Dinas Komunikasi Dan Informatika	62.059.674.196	17.716.251.300	18.716.251.300	61.187.994.196
32	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42.182.939.115	19.001.208.622	20.001.208.622	42.182.939.115
33	Dinas Olah Raga Dan Pemuda	59.800.023.550	15.769.371.596	41.769.371.596	59.439.523.550
34	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	45.072.242.101	30.547.808.120	30.548.008.120	45.072.242.101
35	Dinas Kelautan Dan Perikanan	164.013.951.850	34.120.636.897	35.120.636.897	164.013.951.850
36	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	213.221.505.196	39.901.832.925	40.901.832.925	213.221.505.196
37	Sekretariat Daerah	562.831.602.207	120.302.293.722	420.302.293.367	562.831.602.207
38	Biro Umum Dan Protokol	34.147.901.900	34.147.901.900	34.147.901.900	34.147.901.900
39	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	21.603.106.650	21.603.106.650	21.603.106.650	21.603.106.650
40	Biro Tata Pemerintahan Dan Otonomi Khusus	22.633.098.622	22.633.098.622	22.633.098.622	22.633.098.622
41	Biro Hukum	27.448.726.913	27.448.726.913	27.448.726.913	27.448.726.913
42	Biro Organisasi	20.737.042.150	20.737.042.150	20.737.042.150	20.737.042.150
43	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	448.630.552.230	282.553.782.528	382.553.782.528	416.455.832.230
44	Sekretariat Majelis Rakyat	404.766.763.303	42.890.474.701	46.890.474.701	404.766.763.303



NO.	SKPD	Jumlah Anggaran (Rp)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		RKPD 2023 (Pagu indikatif)	APBD 2023	RKPD-P 2023 (Pagu indikatif)	Pagu Indikatif (Rp)
	Papua				
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.499.999.300	699.999.733	3.699.999.733	1.499.999.300
46	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	952.722.304.304	717.214.212.215	775.622.612.215	247.445.391.639
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	140.638.340.285	67.879.848.700	82.879.848.700	142.313.340.285
48	Badan Kepegawaian Daerah	71.268.223.517	40.917.497.280	43.917.497.280	53.397.159.781
49	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	119.896.182.150	51.303.535.730	52.303.535.730	119.868.182.150
50	Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerja Sama	38.923.721.760	20.803.529.450	21.803.529.450	38.923.721.760
51	Badan Penghubung Daerah	29.925.682.400	16.085.305.329	17.085.305.329	37.128.712.400
52	Inspektorat	86.769.103.345	40.600.447.813	55.600.447.813	62.020.607.170
53	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	39.618.813.591	23.074.954.180	36.166.183.295	33.814.728.333
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.224.261.256.892</b>	<b>2.729.522.413.254</b>	<b>3.292.904.894.982</b>	<b>12.205.134.625.127</b>

Adapun rencana kerja beserta dengan pendanaan program dan kegiatan disetiap urusan pemerintahan daerah dan Organisasi perangkat Daerah yang mengalami perubahan disajikan dalam tabel pada lampiran akhir buku Perubahan RKPD Tahun 2023.